

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI, DAN FAKTOR POLITIK TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

TINA AINI SYAHMIRA LUBIS



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRACT

***THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES COMPETENCIES,
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM, AND POLITICAL FACTOR ON
QUALITY OF FINANCIAL REPORTS AND FINANCIAL PERFORMANCE
OF LOCAL GOVERNMENTS***

(Study on Regional Organization in Bandar Lampung City)

By:

Tina Aini Syahmira Lubis

In the era of globalization, where competition levels are getting higher and tighter, it encourages each government agency to provide useful information to all interested parties. One important instrument used to present government agency information is financial reporting. The quality of financial statements is measured by their compliance with the completeness and accuracy standards established by the government of the report's publication. Research is explanatory research, a method of research that aims to develop the clarity of phenomena occurring at a source and to find answers to causal relationships between variables through hypothesis testing. This study used multiple linear regression analysis to test hypotheses using the SPSS (Statistical Product and Service Solution) software analysis tool. Research data types use primary data by distributing questionnaires. Then for sample acquisition techniques using saturation sampling with a total of 42 respondents. The results of the first, second, third, and fourth hypothesis tests were not proven, while the results of the fifth and sixth hypothesis tests were accepted.

Keywords: Competence; Human Resources; Accounting; information system; Political Factor; Quality Of Financial Reports; Financial Performance; Local Governments

ABSTRAK

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI, DAN FAKTOR POLITIK TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bandar Lampung)**

Oleh:

Tina Aini Syahmira Lubis

Di era globalisasi, dimana tingkat persaingan semakin tinggi dan ketat, mendorong setiap instansi pemerintah untuk memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menyajikan informasi instansi pemerintah adalah pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan diukur dari kesesuaiannya dengan standar kelengkapan dan akurasi yang ditetapkan oleh pemerintah penerbit laporan tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah *explanatory research*, yaitu metode penelitian yang bermaksud mengembangkan kejelasan fenomena yang terjadi pada suatu sumber dan mencoba mendapatkan jawaban atas hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis *software SPSS (Statistical Product and Service Solution)*. Jenis data penelitian mempergunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Kemudian untuk teknik perolehan sampel memakai *saturation sampling* dengan total 42 responden. Hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak terbukti, sedangkan hasil pengujian hipotesis kelima dan keenam dinyatakan diterima.

Kata Kunci : Kompetensi; Sumber Daya Manusia, Akuntansi; Sistem Informasi; Faktor Politik; Kualitas Laporan Keuangan; Kinerja Keuangan; Pemerintah Daerah

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI, DAN FAKTOR POLITIK TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

TINA AINI SYAHMIRA LUBIS

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI, DAN FAKTOR POLITIK
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **TINA AINI SYAHMIRA LUBIS**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1811031007

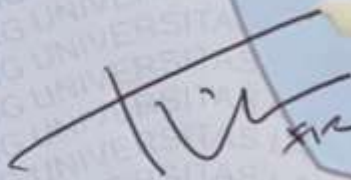
Jurusan


: Akuntansi

Fakultas

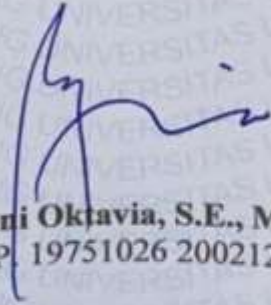
: Ekonomi dan Bisnis




Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP. 197610232002121002


Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak
NIP. 198610272019032007

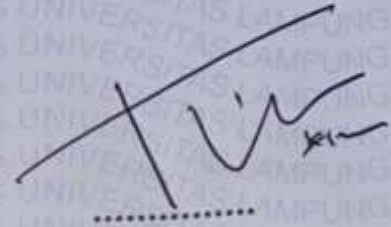
2. Ketua Jurusan


Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19751026 200212 2002

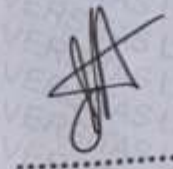
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

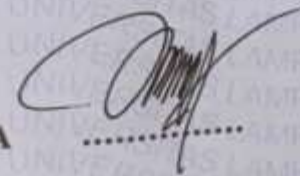
Ketua : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Sekretaris : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak



Penguji Utama : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., AK., CA



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Februari 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tina Aini Syahmira Lubis

NPM : 1811031007

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Faktor Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung)" adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 27 Maret 2023

Penulis



Tina Aini Syahmira Lubis

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Mei 2000 dengan nama lengkap Tina Aini Syahmira Lubis sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Hamid dan Ibu Nur. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2012.

Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F), sebagai Kepala Biro Galeri Investasi di Kelompok Studi Pasar Modal periode 2020-2021.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Hamid dan Ibunda Nur 'Aini yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, nasihat, doa, dukungan, dan perjuangan yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis. Terima kasih yang tiada tara kepada ayah dan ibu karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis tanpa lelah. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan di dunia maupun akhirat, Aamiin.

Adik-adikku yang kukasihi, Ririn dan Aisyah, yang telah memberikan dukungan, doa serta motivasi semangat dalam proses mencapai impianku.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi tiada henti dalam susah maupun senang.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah:6

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Faktor Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktaviani, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu memberikan bimbingan, saran, dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

5. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., AK., CA selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh karyawan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden pada penelitian ini.
11. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Hamid dan Ibu Nur 'Aini. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, dan segalanya yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat menjadi kebanggaan keluarga dan dapat membahagiakan kalian.
12. Adik-adikku tersayang, Ririn dan Aisyah, terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, doa, serta menjadi pemacu

semangatku. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan serta membalas kebaikanmu.

13. Tanteuku tersayang, Rosida, terima kasih telah memberikan hiburan dan kebahagiaan.
14. Kakak dan Adik sepupuku, Kak Marina dan Caca, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa.
15. Seluruh keluarga besarku yang memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta doa.
16. Sahabat-sahabatku tersayang, Deza, Dian, dan Tyo terimakasih telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya selama ini.
17. Sahabat-sahabatku, Fitria, Rini, Euis, Ela, dan Dinny, terimakasih telah menemani mulai dari masuk dunia perkuliahan sampai dengan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, doa, motivasi, dan telah menjadi pendengar keluh kesahku.
18. Teman-teman seperjuanganku di jurusan akuntansi, Salma, Gita, Oni, dan Oliv. Terima kasih telah menemani masa perkuliahan yang cukup berat ini. Terimakasih doa, dukungan, motivasi, dan bantuan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini
19. Seluruh teman-teman Akuntansi 2018 yang telah kebersamai, saling mendukung selama proses perkuliahan, dan sukses untuk kalian semua.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT.

21. Alamamaterku tercinta Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandarlampung, 27 Maret 2023

Penulis

Tina Aini Syahmira Lubis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, dan Faktor Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bandar Lampung)”.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis menerima saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Bandarlampung, 27 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan.....	14
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah	15
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia	16
2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi.....	17
2.1.6 Faktor Politik	18
2.2 Kerangka Peemikiran	19
2.3 Pengembangan Hipotesis	20
2.3.1 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
2.3.2 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
2.3.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	22
2.3.4 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	23

2.3.5 Pengaruh Faktor Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
2.3.6 Pengaruh Faktor Politik Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Populasi dan Sampel	26
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Metode Analisis Data	29
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	29
3.5.2 Uji Kualitas Data	30
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	30
3.5.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	31
3.5.5 Uji Hipotesis	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Pengumpulan Data	33
4.2 Hasil dan Analisis Penelitian.....	33
4.2.1 Analisis Deskriptif	33
4.2.2 Uji Kualitas Data	36
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	38
4.2.4 Analisis Regresi	40
4.2.5 Uji Hipotesis	42
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
4.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	45
4.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	46
4.3.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	47
4.3.4 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	48

4.3.5 Pengaruh Faktor Politik terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Keterbatasan Penelitian	52
5.3 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	27
Tabel 4.1 Data Hasil Kuesioner	33
Tabel 4.2 Persentase Nilai Indeks	35
Tabel 4.3 Kesimpulan Data Deksriptif.....	35
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	37
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	38
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	39
Tabel 4.7 Analisis Regresi Linear Berganda Y1	40
Tabel 4.8 Analisis Regresi Linear Berganda Y2.....	41
Tabel 4.9 Hasil Uji t Terhadap Y1	42
Tabel 4.10 Hasil Uji t Terhadap Y2	43
Tabel 4.11 Data Latar Belakang Pendidikan	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, di mana tingkat kompetisi semakin tinggi dan ketat, mendorong setiap instansi pemerintah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menyajikan informasi instansi pemerintah adalah laporan keuangan. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas Wati et al., (2014). Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Tawaqal & Suparno, 2019). Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan

transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik untuk berbagai kepentingan pengguna salah satunya penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan (Zulfah et al., 2017).

Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2009-2019 memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung, namun pada tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya mendapat predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dan 2021. Predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2020 disebabkan adanya permasalahan baik dalam penyajian materi maupun dalam pos laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan terdapat pokok- pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung.

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada Mulia (2019). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangannya seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Penelitian Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai

lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kinerja pemerintah menunjukkan deskripsi dari tingkat pencapaian suatu kegiatan, program atau kebijakan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja pemerintah saat ini menjadi sorotan publik karena kinerja menggambarkan hasil kerja yang dicapai pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman, serta keterampilan Novianti et al., (2018). Nawawi (dalam Novianti et al., 2018) menjelaskan kinerja pemerintah yang baik tidak hanya sekedar input atau output namun sebuah orientasi pada hasil. Kinerja pemerintah harus memiliki hasil, manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat, sehingga pencapaian serapan anggaran saja tidak dapat dijadikan ukuran yang memadai dan dapat menggambarkan manajemen kinerja pemerintahan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsyiati et al., (2008) menyimpulkan bahwa dengan baiknya kinerja karyawan, maka kemungkinan besar kinerja organisasi juga baik. Kinerja karyawan akan lebih baik apabila bersedia bekerja karena digaji, memiliki keahlian yang tinggi, memiliki harapan masa depan lebih baik. Hal ini berarti kualitas SDM sangat menentukan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi dengan peningkatan kinerja yang sangat diharapkan. Tuasikal (2007) menjelaskan bahwa untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Menurut Alfiandri (dalam Kuasa et al., 2016) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan yang merupakan salah satu syarat normatif kualitatif

laporan keuangan. SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Kuasa et al., 2016).

Laporan keuangan pemerintah merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi penggunanya, untuk menghasilkan informasi yang berkualitas baik, sebuah organisasi harus mempunyai Sistem Informasi yang baik, sistem Informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi, hal ini berlaku baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik seperti di Pemerintah Daerah Laudon & Laudon (2007). Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 yang direvisi oleh Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2010, aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007, Sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik.

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan kinerja adalah faktor politik. Faktor politik dapat berupa intervensi politik di bidang keuangan dan tidak adanya sinergi antara proses politik dan institusi politik pada domain penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai perilaku politik yang berpotensi mempengaruhi pemerintah antara lain merahasiakan informasi penting dari para pengambil keputusan, bergabung dengan koalisi, menyebarkan rumor, membocorkan informasi rahasia ke media, serta melobi untuk atau menentang kepentingan individu tertentu atau untuk keputusan alternatif. Akibatnya, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan publik berada di bawah indikator yang terukur. Hal ini menjadi kendala utama bagi daerah karena pada setiap akhir tahun perencanaan, target perencanaan yang disusun di awal tahun sebagian besar tidak tercapai atau gagal. (Nirwana & Haliah, 2018)

Maka berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem**

Informasi Akuntansi, dan Faktor Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bandar Lampung)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah politik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mencari bukti empiris apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mencari bukti empiris apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Mencari bukti empiris apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Mencari bukti empiris apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
5. Mencari bukti empiris apakah politik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
6. Mencari bukti empiris apakah politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat ilmiah, yaitu sebagai bahan kajian bagi para praktisi dan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan kajian untuk peneliti-peneliti selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik dan lebih khusus terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- b. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini OPD terkait sehingga dapat menjadi titik ukur dalam menilai kinerja aparatur pemerintahan dan perangkat-perangkat organisasi yang terkait di dalamnya dalam mewujudkan good governance yang salah satu indikatornya tercermin melalui kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Pada sektor publik hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah disini provinsi menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan kepusat setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan legislatif adalah *principal* Halim (2007). Legislator adalah pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislative untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau di tolak.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran atau taraf seberapa mampu informasi laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan yang disyaratkan dalam pengungkapan secara penuh dan wajar. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) penting, sebab membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhannya atas informasi keuangan sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik berdasarkan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar menjadi salah satu bentuk tata kelola pemerintah yang baik Zebua et al., (2020). Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 akuntansi pemerintahan memuat kriteria dan unsur yang membentuk kualitas laporan keuangan, yaitu dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*).

Menurut penelitian Zebua et al., (2020) laporan keuangan yang berkualitas didasari oleh teori keagenan, yaitu pemerintah daerah sebagai agen bertugas untuk memberikan jasa, dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, yang dilakukan atas kepentingan publik yang diwakilkan oleh DPRD sebagai wakil rakyat. Pemerintah daerah merupakan agen bagi DPRD dan publik/rakyat (*dual accountability*) dan DPRD menjadi agen bagi publik. Intinya adalah pertanggungjawaban laporan keuangan dilakukan atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Penelitian Sumarjo (2010) mengatakan bahwa kinerja disebut juga sebagai *performance* yang artinya adalah pencapaian suatu target (keberhasilan) dari sesuatu yang direncanakan dalam organisasi. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah menunjukkan deskripsi dari tingkat pencapaian suatu kegiatan, program atau kebijakan

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja pemerintah saat ini menjadi sorotan publik karena kinerja menggambarkan hasil kerja yang dicapai pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman, serta keterampilan (Novianti et al., 2018).

Menurut Halim (2012, h. 232), kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati Wijayanti (2017). Hutapea & Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, ketrampilan dan perilaku individu.

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya. Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi organisasi. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan yang cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat;
2. Ketrampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal;
3. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan organisasi. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung

pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2004) dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Krismiaji (2010) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun internal lembaga/instansi. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat dioperasikan tanpa menggunakan komputer, akan tetapi keterlibatan komputer dalam menangani tugas-tugas manusia dalam suatu sistem memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kelancaran sebuah sistem, sehingga informasi sangat dibutuhkan pihak manajemen dapat disajikan dengan cepat dan tepat waktu (Tawaqal & Suparno, 2019).

Dalam sistem informasi akuntansi ada beberapa unsur penting yang dijadikan pedoman bagi para petugas akuntansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hill & Wilkinson (2004) mengungkapkan bahwa adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia dan alat. Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan dalam mengambil keputusan dan mengendalikan jalannya sistem computer
2. Data. Catatan merupakan dasar konsep pengendalian yang akurat yang menyediakan pengecekan atas penggunaan informasi-informasi

3. Informasi. Sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Informasi ini berupa hasil cetak komputer maupun tampilan monitor.

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi seperti sumber daya manusia, alat, data, dan informasi merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pemerintahan daerah.

2.1.6 Faktor Politik

Budiardjo (2008) mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Jadi politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warga negara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik. Menurut Umaroh et al., (2016) segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warganegara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik. Oleh karena itu, politik memiliki arti yang luas.

Politik merupakan perilaku eksekutif untuk memperkuat kekuatan dalam mempengaruhi keputusan Wulandari (2000). Pelaksanaan proses politik untuk mencapai tujuan pribadi atau organisasi melibatkan berbagai dimensi atau indikator antara lain:

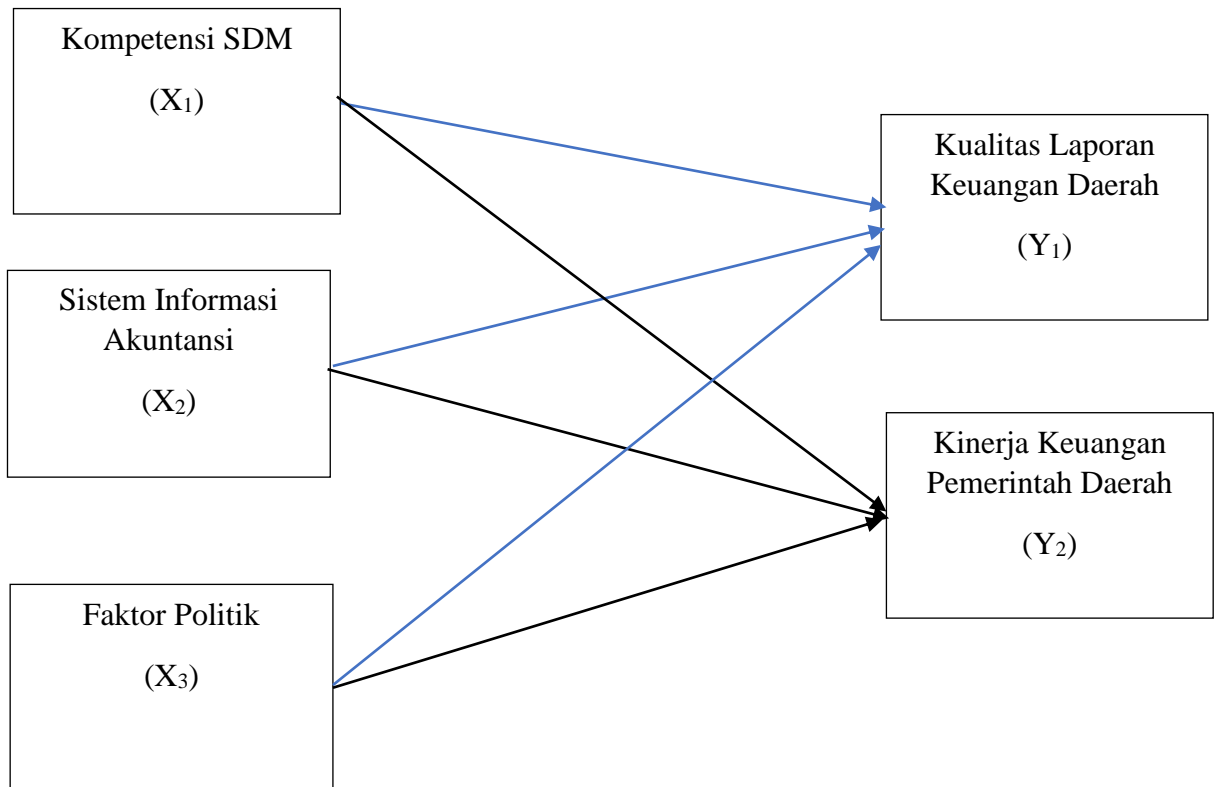
1. Koordinasi, merupakan penggabungan dari unsur-unsur manajemen mulai dari *planning, organizing, actuating dan controlling (POAC)* baik secara vertikal maupun horizontal sehingga terbentuknya kerjasama/kolaborasi. Koordinasi dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang yang tepat, pembagian kerja yang jelas, serta adanya komunikasi yang baik antar anggota organisasi. Koordinasi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam suatu organisasi (Enadarlita & Asvio, 2019).

2. Koalisi, merupakan kerjasama satu atau beberapa partai dan organisasi politik. Sifat koalisi bisa kerjasama dan tentu dengan sudut pandang yang simple dan ideal. Koalisi politik dapat tercipta secara utuh dan tidak bisa berubah tetapi dapat juga berubah sewaktu-waktu. Koalisi juga dapat terbentuk secara insidental serta dengan beberapa persetujuan tertentu, sehingga setelah beberapa tujuan tercapai dengan sendirinya koalisi yang terbentuk akan hilang atau pecah (Munadi, 2019).
3. Negosiasi, muncul dalam praktik bisnis, sebagai suatu proses untuk berunding atau yang terjadi sebelum adanya kata sepakat para pihak. Negosiasi merupakan kegiatan atau sarana bagi para pihak untuk melakukan pembicaraan atau perundingan, dimana pihak yang satu memberi penawaran pada pihak lainnya dan sebaliknya tentang sesuatu yang menjadi tujuan bersama yang diharapkan nantinya dapat tercapai kesepakatan (Irianto, 2014).
4. Kolaborasi, kerja sama secara intensif dari dua orang/lembaga atau lebih untuk saling memahami dan menyadari perlunya kerja sama sebagai upaya atau strategi bersama dalam menghadapi sesuatu yang penting, khususnya kerja sama secara intensif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan bersama (Saleh, 2020).

Indikator-indikator tersebut dapat menyatukan visi, misi dan program kerja sehingga tujuan pribadi atau organisasi dapat tercapai secara optimal.

2.2 Kerangka Peemikiran

Dalam penelitian ini variabel independen adalah faktor pribadi, faktor sistem/admnistrasi, dan faktor politik. Sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah. Menurut Sugiyono (2014) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai indikator yang yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan dan sikap pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati, dan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan Yaqin & Jatmiko (2018). Menjadi seorang aparatur yang berkompeten, hendaknya memiliki beberapa komponen yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, keterampilan. Jadi sumber daya manusia yang berkompeten harus memiliki motif untuk bertindak dan mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat atau karakter fisik, memiliki konsep diri atau percaya diri, memiliki pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki seseorang, memiliki keterampilan atau kemampuan mengerjakan pekerjaan Husna et al., (2022). Sumber daya manusia dalam hal ini pengelola keuangan, jika tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat

menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat, hal ini karena pengelola keuangan tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya (Husna et al., 2022).

Penelitian Prawirosentono (2005), Nirwana & Haliah (2018), dan Wati et al., (2014) menyatakan bahwasanya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Akan tetapi, penelitian Zuliarti (2012) mengatakan bahwasanya kapasitas SDM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satunya adalah penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu serta kualitas opini BPK atas LKPD yang meningkat yang menjadi indikator utama demi terwujudnya kinerja pengelolaan keuangan yang baik Utomo (2012). Maka dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten yang didukung dengan latar belakang akuntansi di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Penelitian Safwan et al., (2014) mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Seorang pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang diembannya selalu terdorong untuk bekerja secara efektif,

efisien dan produktif. Hal ini terjadi karena dengan kompetensi yang dimiliki pegawai bersangkutan semakin mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Diharapkan pegawai berkompentensi akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam hal memperoleh opini BPK yang terbaik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Penelitian Rafar et al., (2015) dan Safwan et al., (2014) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, penelitian Nirwana & Haliah (2018) menemukan bahwa faktor pribadi (kompetensi) tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja. Tinggi rendahnya faktor pribadi (kompetensi) tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adanya kemajuan dalam hal teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Hal ini didukung dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah yang baik dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Penelitian Tawaqal & Suparno (2019), Gusherinsya & Samukri (2020), dan Lestari & Dewi (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi maka semakin baik pula

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Akan tetapi, penelitian Yanti et al., (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka, peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H3 : Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk pembuat keputusan Romney & Steinbart (2006). Sistem informasi keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) yaitu suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Penelitian Darpito et al., (2015), Hanum et al., (2017), dan Sumartini (2021) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, penelitian Lestari & Dewi (2020) menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sehingga peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H4 : Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.5 Pengaruh Faktor Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor politik merupakan kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah regulasi. Faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting

di dalam stuktur pemerintahan, faktor politik berperan dalam pembuatan sebuah regulasi dan aturan di dalam pemerintahan Fardian (2014). Faktor politik memiliki andil yang besar karena fakta bahwa karakteristik khas sektor publik di Indonesia, terutama pemerintah, sangat dipengaruhi oleh keadaan politik. Oleh karena itu, Kepala Daerah beserta stafnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus saling melengkapi, berkoordinasi, menyinkronkan, dan bermitra satu sama lain dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka tidak mustahil untuk menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik pula. Berdasarkan teori penetapan tujuan, pengelolaan faktor politik dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan. Dengan menerapkan hubungan bermitra satu sama lain secara positif serta melakukan koordinasi secara terperinci dan menyeluruh, maka akan menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik (Angelina, 2021)

Selain itu untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, diperlukan penerapan transparansi laporan keuangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan sebuah sistem atau tata cara dalam menghasilkan sebuah hasil. Sebuah sistem tentunya diatur oleh regulasi, hukum ataupun peraturan daerah terkait (Zenita & Basri, 2021). Faktor politik berperan dalam menekan organisasi untuk mengimplementasikan transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat yang terkait dengan organisasi tersebut dan memberlakukan kebijakan yang mendukung upaya implementasi transparansi pelaporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nirwana & Haliah (2018) dan Angelina (2021) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh antara faktor politik terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5 : Faktor politik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.6 Pengaruh Faktor Politik Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Politik dalam proses pengambilan keputusan strategis merupakan salah satu dimensi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Faktor politik merupakan media yang penting dalam peningkatan kinerja keuangan di pemerintahan karena ia berfungsi sebagai media adaptasi dan mempengaruhi proses keputusan strategis perilaku eksekutif Wulandari (2000). Munculnya teori “*Midrange*” oleh Eisenhardt & Bourgeois (1988) menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan pemerintahan dengan politik. Teori ini mengatakan bahwa politik memiliki pengaruh yang penting dalam kinerja karena dimunculkan dari faktor-faktor manajerial dan kontekstual yang akan memperkaya kontrol eksternal perusahaan terhadap pilihan strategis yang ada.

Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam hubungan kerja dan fungsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satunya ialah hubungan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Sugianto, 2017).

Penelitian Papadakis et al., (1998) menyimpulkan bahwa politik dan kinerja berhubungan positif pada perusahaan pemerintah. Selain itu penelitian Arifai & Abral (2013) telah menemukan bahwa faktor politik merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerintahan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Nirwana & Haliah (2018) bahwa faktor politik tidak secara langsung mempengaruhi kinerja. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H6 : Faktor politik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst. Djarwanto, (1994:420). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sedangkan yang menjadi responden penelitian adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di OPD Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pembantu PPK di OPD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Nana Sudjana dan Ibrahim (2004: 85), Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara metode *Saturation Sampling*. *Saturation Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan mengikutsertakan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian.

Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian

No.	Organisasi Perangkat Daerah	No.	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.	Dinas Penanaman Modal (PTSP)
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4.	Dinas Komunikasi dan Informasi	11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
5.	Dinas Koperasi dan UKM	12.	Dinas Perdagangan
6.	Dinas Lingkungan Hidup	13.	Dinas Perhubungan
7.	Dinas Pangan	14.	Dinas Perindustrian

15.	Dinas Pariwisata	29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.	Dinas Pekerjaan Umum	30.	Dinas Pertanian
17.	Dinas Kesehatan	31.	Dinas Perumahan dan Pemukiman
18.	Bagian Kerjasama Daerah	32.	Dinas Sosial
19.	Bagian umum	33.	Dinas Tenaga Kerja
20.	Badan Kepegawaian Daerah	34.	Bagian Hukum
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.	Bagian Organisasi
22.	Bagian Pemerintahan	36.	Bagian Perencanaan dan Keuangan
23.	Inspektorat	37.	BPBD
24.	Bagian Administrasi Pembangunan	38.	BPKAD
25.	DPRD Kota Bandar Lampung	39.	BPPRD
26.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	40.	Bagian Protokol
27.	Sekretariat Korpri	41.	Bagian Ekonomi
28.	Badan Kesbangpol	42.	Polisi Pamong Praja

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian explanatory, yaitu suatu metode penelitian yang bermaksud untuk pengembangan kejelasan fenomena yang terjadi pada suatu sumber dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi, sistem informasi akuntansi, dan faktor politik dan dependennya adalah kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala Ukur
1. X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan	Indikatornya adalah pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan sikap perilaku Hutapea & Thoha (2008).	Skala Likert Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju 2= Tidak Setuju 3= Netral 4= Setuju

	keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati Wijayanti (2017).		5= Sangat Setuju
2. X2: Sistem Informasi Akuntansi	Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan Mokoginta et al., (2017).	Indikatonya adalah sumber daya manusia dan alat, data, dan informasi Hill & Wilkinson (2004).	Skala Likert Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju 2= Tidak Setuju 3= Netral 4= Setuju 5= Sangat Setuju
3. X3: Faktor Politik	Faktor politik adalah kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah regulasi, yang dimana dalam hal ini faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting di dalam struktur pemerintahan yang nantinya dapat memudahkan atau menyulitkan transparansi pelaporan laporan keuangan daerah Fardian (2014).	Indikator Faktor Politik yaitu koordinasi, koalisi, negosiasi, dan kolaborasi (Haliah & Nirwana, 2019).	Skala Likert Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju 2= Tidak Setuju 3= Netral 4= Setuju 5= Sangat Setuju
4. Y1: Kualitas Laporan Keuangan	Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.	Indikatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.	Skala Likert Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju 2= Tidak Setuju 3= Netral 4= Setuju 5= Sangat Setuju
5. Y2: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja Keuangan merupakan gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan Saraswati & Rioni (2019).	Indikatornya adalah indikator kinerja Masukan (<i>Input</i>), Proses (<i>Process</i>), Keluaran (<i>Output</i>), Hasil (<i>Outcome</i>) dan Manfaat (<i>Benefit</i>). Mahsun, M. (2013)	Skala Likert Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju 2= Tidak Setuju 3= Netral 4= Setuju 5= Sangat Setuju

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian, karena tujuan utama

melakukan penelitian adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan secara khusus melalui peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner peneliti yang diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di OPD Pemerintah Kota Bandar Lampung. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial sebagai berikut:

1. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
2. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)
3. Skor 3 untuk jawaban Netral (N)
4. Skor 2 untuk jawaban Tidak setuju (TS)
5. Skor 1 untuk jawaban Sangat tidak setuju (STS)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan atau (observasi), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Menurut (Sugiyono, 2014, h. 230) kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis bersifat deskriptif artinya digunakan untuk mendeskripsikan mengenai karakteristik data, sehingga lebih mudah dipahami dan terbentuk informasi yang lebih ringkas serta menggambarkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Analisis deskriptif ini menghitung nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, nilai maksimum, nilai minimum, dan *range* data (Ghozali, 2005).

3.5.2 Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang di analisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data yaitu: validitas dan realibilitas. Artinya suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang biasa jika datanya kurang valid dan kurang reliable. Adapun uji kualitas yang digunakan yaitu:

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono (2016, h. 172) bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yang valid. Untuk mencari nilai validitas di sebuah item kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut:

- a. Jika nilai sig. $< 0,05$, dan nilai r-Hitung $> r$ -Tabel item-item tersebut dinyatakan valid
- b. Jika nilai sig. $> 0,05$ dan nilai r-Hitung $< r$ -Tabel item-item tersebut dinyatakan tidak valid

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2021)

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai kesalahan taksiran model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau

mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kolmogorov semirnov* menggunakan program SPSS 22.

- a. Berdistribusi normal jika Asympatic Sig. (2-tailed) > tingkat signifikansi (0,05).
- b. Tidak berdistribusi normal jika Asympatic Sig. (2-tailed) < tingkat signifikansi (0,05).

3.5.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis software SPSS (Statistical Product and Service Solution). Variabel yang digunakan dalam model regresi berganda diformulasikan sebagai berikut:

$$Y1 = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y2 = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y1 = Kualitas Laporan Keuangan
Y2 = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
a = Konstanta
X₁ = Kompetensi
X₂ = Sistem Informasi Akuntansi
X₃ = Faktor Politik
 β = Koefisien
e = *Standart eror*

3.5.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang penting dalam penelitian, setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

1. Uji t

Digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan nilai signifikansi

kurang dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau sebesar 0.05. Jika nilai signifikansi suatu variabel kurang dari atau sama dengan α (0.05), maka dapat diartikan bahwa variabel independen (bebas) tersebut secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi suatu variabel lebih besar dari α (0.05), maka dapat diartikan bahwa variabel independen (bebas) tersebut secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS (Statistical Package for Social Science).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan faktor politik terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena kurangnya karyawan dibidang keuangan/tata usaha di OPD pemerintah Kota Bandar Lampung dengan latar belakang pendidikan akuntansi.
2. Kompetensi SDM (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini membuktikan bahwa pegawai yang memiliki basis pendidikan keuangan akan lebih mampu untuk bekerja secara efektif dibidang keuangan/tata usaha di OPD pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Sistem informasi akuntansi (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi saja tidak cukup untuk mengukur kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi yang digunakan, peran PPK-OPD, rekonsiliasi, dan sistem pengendalian internal
4. Sistem informasi akuntansi (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini karena, kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti semakin tingginya/besarnya tingkat kekayaan daerah (*wealth*), ukuran pemerintah daerah (*size*), *leverage*, dan pendapatan pajak daerah

5. Faktor politik (X3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena, dengan diterapkannya koordinasi secara terperinci serta kerja sama yang baik antara kepala daerah dan staffnya di tiap tingkatan daerah akan membantu menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.
6. Faktor politik (X3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena, aktivitas politik dalam sistem koordinasi, koalisi, negosiasi, dan kolaborasi secara aktif dapat menyatukan visi, misi dan program kerja sehingga tujuan pribadi atau organisasi dapat tercapai secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitiannya antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang hanya 42 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada variabel kompetensi SDM, sistem informasi akuntansi, dan faktor politik sebagai variabel independen serta kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Dimungkinkan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Terdapat item pernyataan di dalam kuesioner yang kurang tepat untuk mengukur variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (X3) yang disebarkan oleh peneliti.
4. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, selain itu, faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya menghasilkan data yang berbeda.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang diungkapkan peneliti di atas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menyempurnakan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel di luar penelitian ini. Mengingat kemampuan yang dimiliki dalam menerangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah masih terbatas.
3. Bagi pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan penempatan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu pada bagian keuangan diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syarifudin, & Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen) Akhmad Syarifudin. *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, Desember 2014, 14(25)*, 26–44.
- Angelina, I. D. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. 1996*, 1–10.
- Arifai, M., & Abral, E. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9)*, 1689–1699.
- Arsyati, Darwanis, & Djalil, M. A. (2008). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Pnbp Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi, 1(1)*, 29–49.
- Bahri, Syamsul, S. & G. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi (JA), 2(2)*, 51–59.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darpito, O., Basri, H., & Arfan, M. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 4(4)*, 57–67.
- Eisenhardt, K. M., & Bourgeois, L. J. (1988). Politics of Strategic Decision Making in High-Velocity Environments: Toward a Midrange Theory. *Academy of Management Journal, 31(4)*, 737–770.
<https://doi.org/10.2307/256337>
- Enadarlita, E., & Asvio, N. (2019). Pengaruh Koordinasi Dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi Di Provinsi Jambi. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan), 4(1)*, 34.
<https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2473>
- Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi, 3(1)*, 1–18.
- Febrian Cahyo Pradono, & Basukianto. (2015). KUALITAS LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH:FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN(Studi Pada SKPD
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 188–
200.

- Ghozali, I. (2005). *Metode Penelitian Bisnis* (Jilid I Ed). Erlangga.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusherinsya, R., & Samukri. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 58–68.
- Haliah, H., & Nirwana, N. (2019). The development of good governance model for performance improvement. *International Journal of Excellence in Government*, 1(1), 21–36. <https://doi.org/10.1108/ijeg-09-2018-0004>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Tiga). Salemba 4.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah* (Empat). Penerbit Salemba Empat.
- Hanum, S., Zulfiar, E., & Agustina, N. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3(3), 86–96.
- Hill, J., & Wilkinson, C. (2004). Methods for ecological monitoring of coral reefs. *Australian Institute of Marine Science, Townsville*, 117. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Husna, A., Maryam, & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 206–214.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *KOMPETENSI Plus Teori, Desain, Kasus dan Penerapan Untuk HR serta Organisasi yang Dinamis*. PT Gramedia.
- Irianto, S. (2014). Negosiasi dan Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Penyusunan Kontrak. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12(1), 64–74.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kuasa, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2), 47–56.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2007). *Sistem Informasi Manajemen* (10th ed.). Salemba 4.

- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798>
- Munadi. (2019). *Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia*. 2(1), 1–20.
- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors: Personal factor, system/administrative factor. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>
- Novianti, I., Syamsidar, M., & Syawalina, C. F. (2018). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01), 115–130. <https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1256>
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Papadakis, V. M., Lioukas, S., & Chambers, D. (1998). Strategic decision-making processes: The role of management and context. *Strategic Management Journal*, 19(2), 115–147. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199802\)19:2<115::AID-SMJ941>3.0.CO;2-5](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199802)19:2<115::AID-SMJ941>3.0.CO;2-5)
- Prawirosentono. (2005). *Riset Operasi Dan Ekonofisika*. 16, 1290–1318.
- Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 64–71.
- Safwan, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 7(1), 133.
- Saleh, C. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. In *Dapu6107* (1st

ed., Vol. 1).

- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Sugianto, B. (2017). Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014. *Solusi*, 15(3), 343–358.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret*. Surakarta, 1–76.
- Sumartini, B. (2021). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor Balai Desa Karangembang*. 5(2010), 8568–8579.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*. (3rd ed.). BPFE.
- Tawaqal, I., & Suparno. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 02(04), 125–135.
- Tuasikal, A. (2007). Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku). In *Jurnal Keuangan dan Perbankan* (Vol. 10, Issue 1, pp. 1–27).
- Umaroh, U., Desmiyawati, D., & Silfi, A. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 178–192.
- Utomo, J. (2012). Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan*.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153>
- Wijayanti, R. (2017). Pengaruh kompetensi sdm dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017*, 6, 18.
- Wulandari, D. A. (2000). *Politik Dalam Proses Pengambilan Keputusan Strategis*

Untuk Peningkatan Kinerja Keuangan di Bank (Studi Terhadap Bank Umum Pemerintah dan Swasta Di Jawa Tengah).

- Wulandari, S. O., Thoyib, M., & Mubarok, M. H. (2022). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Jurnal Syntax Transformation , Vol . 3 , No . 8 , Agustus 2022. 3(8).*
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1), 1–8.*
<https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 2(1), 1–10.* <https://doi.org/10.18196/rab.020116>
- Zebua, J., Rasuli, M., & Oktari, V. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada OPD Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 1(2), 169–182.*
- Zenita, V., & Basri, Y. M. (2021). Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Pengendalian Internal dan gaya Kepemimpinan dalam meningkatkan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *KAJIAN AKUNTANSI, 22(1), 88–108.*
- Zulfah, I., Wahyuni, S., & Nurfaza, A. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan, 3(November), 46–57.*
- Zuliarti, 2012. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. *Universitas Muria Kudus, 3(2), 55.*
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah